

SELASA
26 OKTOBER 2010

Tribun Pontianak



PANDANGAN AKHIR - Ketua DPRD Singkawang, Tjhai Chui Mie, mendandatangani Pandangan Akhir DPRD terhadap laporan keuangan Pemkot Singkawang, Senin (25/10). Sejumlah fraksi di DPRD mendesak Pemkot segera memperbaiki kinerjanya, dan mengganti sejumlah kepala dinas yang performanya menurun.

TRIBUN PONTIANAK/JAMADIN

✓ Golkar Desak Wako Ganti Kadis

■ DPRD Soroti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

SINGKAWANG, TRIBUN - Fraksi Golkar, meminta Wali Kota Hasan Karman, mengganti Kepala SKPD yang tidak membuat laporan dan membuat laporan namun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Hal ini menyikapi penilaian tidak wajar dari BPK, terkait keuangan Pemkot Singkawang

"Dari hasil pemeriksaan BPK, ada tujuh SKPD yang tidak membuat laporan, dan dua SKPD yang membuat laporan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Singkawang memperoleh opini tidak wajar," kata Sekretaris Fraksi Golkar, Reni Asmara Dewi, saat membacakan pandangan akhir fraksinya, di Rapat Paripurna DPRD, Senin (25/10).

Dengan tidak menyampaikan lapo-

ran itu, Reni menilai, tidak adanya keseriusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Kami minta saudara Walikota untuk mengganti kepala SKPD yang mendapat sorotan dari BPK, karena tidak membuat laporan neraca keuangan, sehingga membuat Singkawang memperoleh opini tidak wajar," tegasnya.

Sementara Fraksi Amanat Kebangkitan Sejahtera Daerah (Akseda) dalam pendapat akhir akhirnya, menilai, performa kinerja Pemkot Singkawang menurun, pasalnya BPK memberi opini tidak wajar terhadap neraca keuangan Pemkot.

"Tahun sebelumnya mendapat opini wajar dengan pengecualian, dan sekarang tidak wajar. Ini merupakan tolak ukur performa kinerja Pemerintah

Kota," tutur Urai Aswandi.

Walikota Hasan Karman, menyatakan siap memperbaiki laporan neraca keuangan sesuai dengan yang direkomendasikan DPRD.

"Kita tidak mengabaikan rekomendasi itu, untuk perbaikan. Kita sudah mengirim surat resmi kepada kepala SKPD, terkait dengan temuan BPK, dan mereka sudah melakukan perbaikan, sesuai yang diminta BPK," jelasnya.

Berkaitan saran untuk pergantian kepala SKPD, ia menilai hal itu tidak gampang dilakukan. "Sudah seharusnya, dan kami setiap saat memang sudah melakukan pergantian sesuai dengan kebutuhan. Tapi hal ini tidak gampang, seperti Presiden mengganti kabinet," tuturnya. (din)